



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : RAGIL BUDI ILSYANTORO
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 776212

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m ² /45 m ² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	119.000.000
1. MOTOR, VESPA P 100 50 S / SPM/SCOOTER Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000		
2. MOTOR, KAWASAKI AN130 C (KAZE ZX VR) / SPM/SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
3. MOTOR, VESPA SPRINT IGET 150 ABS A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 48.500.000		
4. MOTOR, PIAGGIO VESPA LX IGET 125 3V IE A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 39.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.500.000
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.154.500.000
III. HUTANG	Rp.	76.601.125
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.077.898.875

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FERASARI SUKMAWATI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3. NHK : 725180

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 65.000.000

1. Tanah Seluas 2756 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 104.750.000

1. MOBIL, SUZUKI KARIMUN WAGON R Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.750.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERTHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.844.342

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 175.594.342

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 175.594.342

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.